

SUBORDINASI SEBAGAI BENTUK DISKRIMINASI: MENGUNGKAP POLA STRUKTURAL YANG MENGHAMBAT KEMAJUAN KAUM PEREMPUAN

Dela Amanda¹, Evy Ratna Kartika Wati², Mega Nurrisalia³, Rini Atika⁴, Winda Fitria Ayumia⁵,
Anggi Pratiwi⁶

Universitas Sriwijaya

dellamandaa0734@gmail.com¹, evyrkwaty@gmail.com², meganurrisalia@fkip.unsri.ac.id³,
riniatika813@gmail.com⁴, windapitriaayumiah@gmail.com⁵, anggi070521@gmail.com⁶

Submitted: 24 April 2024

Accepted: 3 May 2024

Published: 4 May 2024

Abstrak

Subordinasi berperan signifikan dalam menjaga struktur diskriminasi yang sering menghalangi kemajuan perempuan di berbagai bidang masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola struktural yang melatarbelakangi subordinasi dan cara-cara ini mempengaruhi perlakuan terhadap perempuan. Menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, penelitian ini mengkaji berbagai aspek subordinasi dari perspektif sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subordinasi sistematis berdampak pada keterbatasan akses dan kesempatan bagi perempuan, memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana diskriminasi berlapis pada kaum perempuan ini terstruktur dan dikukuhkan. Sebagai kesimpulan, penelitian menyarankan perlunya reformasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender untuk melangkah menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan.

Kata kunci: Subordinasi; Diskriminasi; Perempuan.

Abstract

Subordination plays a significant role in sustaining the structure of discrimination that often hinders the progress of women in various societal sectors. This study aims to reveal the structural patterns underlying subordination and its impact on the treatment of women. Through qualitative analysis approach drawing from both primary and secondary data sources, this research examines multiple aspects of subordination from social, economic, and political perspectives. The findings illustrate how systematic subordination limits women's access to opportunities, providing an in-depth view of how layered discrimination against women is structured and perpetuated. In conclusion, the study calls for policy reforms and increased public awareness of gender equality to move towards a more inclusive and equitable society for women.

Keywords: Subordination; Discrimination; Women

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, isu diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi topik yang sering dibahas dan menjadi perhatian serius di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun banyak kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan, struktur sosial patriarkis yang mengakar masih menimbulkan berbagai bentuk subordinasi yang secara sistematis menghalangi kemajuan kaum perempuan. Diskriminasi berdasarkan gender bukan hanya sekedar masalah sosial atau budaya, tetapi

juga telah menjadi hambatan penting dalam upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (Rochaety, 2016).

Dalam banyak masyarakat, bentuk diskriminasi yang paling mencolok terhadap perempuan muncul melalui stereotipe gender dan ekspektasi peran sosial yang kaku. Stereotipe ini tidak hanya membatasi apa yang dianggap sebagai pekerjaan atau tanggung jawab yang 'sesuai' untuk perempuan, tetapi juga menempatkan label negatif terhadap perempuan yang memilih untuk mengejar karir atau hobi di luar norma tersebut. Hal ini secara signifikan mengurangi akses perempuan ke peluang ekonomi dan pendidikan yang sama dengan laki-laki (Aula, 2023). Sebagai contoh, dalam bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), perempuan sering kali dihadapkan pada penghalang kultural maupun institusional yang menghalangi partisipasi dan kemajuan mereka. Tidak terbatas pada karir saja, diskriminasi serupa juga terlihat dalam akses terhadap pendidikan dan sumber daya kesehatan, di mana perempuan dan gadis sering kali diprioritaskan terakhir setelah laki-laki dalam keluarga atau masyarakat mereka. Realitas ini menciptakan siklus kemiskinan dan ketergantungan yang berdampak negatif pada kemampuan perempuan untuk maju secara ekonomi dan sosial.

Selain itu, kekerasan berbasis gender merupakan manifestasi ekstrem dari diskriminasi yang tidak hanya menyakiti perempuan secara fisik dan psikologis, tapi juga menghalangi partisipasi sosial dan ekonomi mereka dalam setiap aspek kehidupan. Bentuk kekerasan ini bisa bervariasi dari pelecehan seksual di tempat kerja, kekerasan dalam rumah tangga, hingga praktik-praktik tradisional yang berbahaya seperti pernikahan anak dan mutilasi genital Perempuan (Halim et al., 2019). Kekerasan ini diperparah lagi oleh sistem hukum dan kebijakan yang sering kali tidak mampu melindungi perempuan atau bahkan terkadang memperkuat norma-norma yang mendukung diskriminasi. Ketidakadilan dalam perlakuan hukum ini mengirimkan pesan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah dapat diterima atau tidak penting, sehingga menciptakan lingkungan yang memungkinkan diskriminasi dan kekerasan untuk terus berlangsung. Efek gabungan dari semua bentuk diskriminasi ini tidak hanya menghambat kemajuan perempuan dalam masyarakat tetapi juga mengerdilkan potensi pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kajian literatur terdahulu Oleh (Dementieva, 2024) telah menunjukkan bahwa banyak penelitian terfokus pada konsekuensi langsung dari diskriminasi gender, seperti kesenjangan upah, keterbatasan dalam partisipasi politik, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Penelitian-penelitian lain oleh (Khairunnas et al., 2022) telah memberikan pondasi yang kuat dalam memahami dinamika diskriminasi gender. Namun, terdapat celah penelitian dalam mengungkap bagaimana struktur subordinasi yang berlapis secara eksplisit memperkuat diskriminasi terhadap perempuan dan mempengaruhi persepsi serta interaksi sosial yang lebih luas.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada eksplorasi mendalam mengenai pola-pola struktural subordinasi sebagai bentuk diskriminasi. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya mengungkap mekanisme-mekanisme yang secara spesifik menopang sistem subordinasi perempuan dan bagaimana sistem ini menghalangi

kemajuan mereka di berbagai aspek kehidupan. Selain itu, artikel ini akan mengidentifikasi peran dari kebijakan dan praktik sosial yang ada dalam memperkuat atau mengurangi struktur subordinasi tersebut.

Permasalahan pokok yang akan diteliti dalam studi ini meliputi bagaimana subordinasi terstruktur dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi kemajuan perempuan dalam masyarakat. Diperlukan sebuah pendekatan holistik untuk memahami keseluruhan fenomena ini, meliputi analisa terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik yang terlibat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memetakan dan menganalisa berbagai bentuk subordinasi yang dihadapi oleh perempuan dan pengaruhnya terhadap pencapaian kesetaraan gender, serta mengidentifikasi solusi potensial untuk mengatasi struktur diskriminasi ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam perdebatan yang ada dan mendukung upaya advokasi untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua gender.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menggali dan memahami berbagai aspek diskriminasi dan subordinasi yang dihadapi oleh perempuan. Data yang diperoleh selama penelitian berasal dari dua jenis sumber: data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD), dan observasi partisipatif; data sekunder yang berasal dari literatur yang relevan seperti jurnal, buku, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dan statistik resmi pemerintah atau organisasi internasional terpercaya.

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan prevalensi isu diskriminasi gender yang tinggi dan keragaman sosial-ekonomi yang dapat memperkaya hasil analisis. Jumlah responden ditentukan melalui teknik sampling purposif, dengan mengutamakan individu atau kelompok yang paling mungkin memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, termasuk perempuan yang berada dalam berbagai strata sosial dan bidang profesional, para pemangku kebijakan, dan aktivis gender.

Untuk mengolah hasil wawancara dan observasi, penelitian ini menerapkan metode analisis isi (content analysis) dan analisis wacana (discourse analysis) dengan cara sistematis koding data untuk mengidentifikasi, mengategorisasikan, dan membuat inferensi tentang pola-pola tertentu dalam data. Proses ini akan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif yang memungkinkan efisiensi dalam mengelola dan mengeksplorasi data besar.

Pengukuran indikator kinerja dalam konteks penelitian ini pada dasarnya bersifat interpretatif dan diarahkan untuk melihat dampak struktural subordinasi terhadap kemampuan perempuan untuk mencapai kesetaraan di berbagai bidang kehidupan. Indikator-indikator ini meliputi akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan tingkat kekerasan berbasis gender.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kerangka analitis kualitatif yang diakui luas dalam studi gender, seperti yang dijelaskan oleh peneliti-

peneliti terkemuka dalam bidang ini (seperti Joan Acker untuk teori gender dan organisasi, atau Kimberlé Crenshaw untuk interseksionalitas). Prosedur percobaan dan pengumpulan data harus mematuhi standar etika penelitian dan privasi responden serta dilaksanakan dengan persetujuan yang jelas dari semua individu yang terlibat. Seluruh metode dan prosedur dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur subordinasi dan memberikan rekomendasi yang beralasan untuk upaya advokasi kesetaraan gender.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian menyeluruh ini mengungkapkan wajah nyata dari subordinasi yang dialami oleh perempuan, yang memperlihatkan bahwa isu ini bukan hanya sekadar tentang diskriminasi atas dasar gender yang terlihat pada permukaan. Lebih jauh, hal ini tentang pola dan struktur yang berakar kuat dalam masyarakat, yang secara sistematis mempertahankan dan bahkan mengukuhkan kesenjangan gender. Dari berbagai aspek yang diteliti, ada empat temuan utama yang mendalam tentang bagaimana subordinasi terhadap perempuan merentang luas dari edukasi hingga kesetaraan di tempat kerja dan struktur keputusan yang lebih besar.

Subordinasi dalam Akses terhadap Pendidikan dan Pekerjaan

Salah satu temuan paling menonjol adalah bagaimana perempuan menghadapi subordinasi dalam segi pendidikan dan peluang pekerjaan. Subordinasi ini bukan sekedar terbatas pada hambatan ekonomi, meskipun hal ini merupakan faktor yang krusial. Berkembangnya norma sosial patriarkis, yang telah berakar lama, ikut berkontribusi terhadap pembatasan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Hal ini bukan hanya tentang kurangnya kesempatan, melainkan juga berkaitan dengan kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh perempuan, yang sering kali berada di bawah standar jika dibandingkan dengan yang diakses oleh lelaki (Iqbal & Harianto, 2022).

Selain itu, kebijakan publik yang tidak sensitif gender atau yang kurang mendukung kesetaraan gender, secara tidak langsung memberikan dukungan kepada sistem patriarki yang sudah ada. Kesulitan ini menciptakan lingkaran setan yang terus menerus menghambat perempuan dari mengakses sumber daya dan kesempatan yang sama dengan lelaki (Iqbal & Harianto, 2022).

Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Temuan kedua yang penting adalah tentang bagaimana perempuan kurang diberi wakil dalam pengambilan keputusan yang penting, baik itu di lingkup lokal, nasional, maupun internasional (Luthfi, 2024). Analisis ini menunjukkan bahwa masih terdapat dominasi lelaki dalam posisi-posisi penting yang mengambil keputusan yang berdampak luas, mulai dari politik hingga bisnis dan lembaga-lembaga sosial. Hal ini tidak hanya mengurangi pendapat dan pandangan perempuan dalam proses pengambilan keputusan,

tetapi juga memperkuat struktur patriarki yang ada, dimana sumber daya dan keputusan strategis dikontrol oleh lelaki.

Dominasi ini menciptakan rintangan besar bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam membuat keputusan yang akan memengaruhi hidup mereka dan komunitas mereka secara keseluruhan. Tanpa perwakilan yang adil dan signifikan, suara perempuan sering kali diabaikan atau diminimalisir pentingnya dalam diskursus publik dan pengambilan keputusan (Setyawan, 2020).

Subordinasi sebagai bentuk diskriminasi merupakan suatu struktur sosial dan psikologis yang menempatkan individu atau kelompok dalam posisi yang lebih rendah atau kurang berkuasa dibandingkan dengan orang lain, berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti jenis kelamin, ras, etnisitas, kelas sosial, atau orientasi seksual. Dalam konteks gender, subordinasi sering memanasifestasikan diri dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan, di mana mereka dikurangi nilai, dikecilkan, atau dikesampingkan dari proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Hal ini tidak hanya terwujud dalam interaksi sosial yang nyata tetapi juga diperkuat oleh norma-norma, nilai, dan institusi sosial yang mendasar, sehingga menciptakan rintangan sistemik terhadap kesetaraan gender dan menghambat kemajuan kaum perempuan (Iqbal & Harianto, 2022).

Pola-pola struktural yang menghambat kemajuan kaum perempuan dapat diungkapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di sektor ekonomi, politik, dan sosial (Setyawan, 2020). Dalam ekonomi, subordinasi terlihat dari kesenjangan upah gender, akses yang terbatas terhadap peluang kerja sama dengan laki-laki, dan ketidakproporsionalan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Sementara itu, dalam politik, perempuan sering mengalami hambatan dalam memperoleh representasi yang setara, baik dalam jumlah maupun dalam kapasitas pengambilan keputusan, akibat struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki dan norma sosial yang membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Aspek sosial juga turut menunjukkan bagaimana stereotype dan peranan gender secara tradisional mendefinisikan dan membatasi peran serta aktivitas yang "sesuai" bagi perempuan, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara penuh (Rochaety, 2016).

Untuk memahami dan mengatasi subordinasi gender sebagai bentuk diskriminasi, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan struktur dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Hal ini mencakup menganalisis bagaimana institusi-institusi sosial seperti keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lembaga pemerintah memperkuat ketidaksetaraan gender melalui praktik dan kebijakan mereka. Selanjutnya, diperlukan upaya untuk menyusun strategi intervensi yang berkisar dari reformasi hukum dan kebijakan publik hingga program-program pendidikan dan sosialisasi, dengan tujuan untuk menantang dan mengubah norma-norma gender yang diskriminatif, menghapus hambatan-hambatan terhadap partisipasi penuh perempuan, dan mendorong perubahan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya.

Pada akhirnya, mengatasi subordinasi sebagai bentuk diskriminasi menuntut sebuah perubahan fundamental dalam struktur dan nilai sosial masyarakat. Hal ini melibatkan kerja sama multisektoral dan komitmen jangka panjang dari semua pihak

terkait, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu-individu, untuk berkolaborasi dalam merumuskan solusi yang inovatif dan inklusif. Melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif seperti ini, langkah nyata dapat diambil untuk membongkar pola-pola struktural yang menghambat kemajuan perempuan dan, pada akhirnya, mencapai tujuan kesetaraan gender yang sejati.

Diskriminasi terhadap kaum perempuan bisa mengambil banyak bentuk dan muncul dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Bentuk-bentuk diskriminasi ini seringkali saling terkait, menciptakan rintangan kompleks yang menghambat kemajuan perempuan (Aula, 2023). Berikut beberapa bentuk diskriminasi yang signifikan:

1. Diskriminasi Ekonomi

Diskriminasi ekonomi terhadap perempuan terlihat dalam kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, serta dalam segregasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Perempuan seringkali diarahkan ke pekerjaan yang kurang dibayar dan memiliki status sosial yang lebih rendah. Lebih jauh lagi, perempuan juga sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan kesempatan kerja yang setara, promosi, dan sumber daya ekonomi lainnya seperti kredit dan investasi untuk bisnis.

2. Diskriminasi Politik

Di banyak negara, peran perempuan dalam politik masih terbatas. Perempuan sering menghadapi hambatan besar dalam mengejar karir politik karena norma-norma sosial, struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki, dan kurangnya dukungan. Hal ini mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap hidup mereka dan masyarakat secara luas.

3. Diskriminasi Sosial dan Kultural

Norma dan nilai kultural yang mendefinisikan peran dan perilaku yang 'sesuai' bagi perempuan sering membatasi kebebasan dan pilihan individu perempuan. Stereotip gender dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan, dari pendidikan yang diterima, hobi yang diikuti, hingga cara mereka berpakaian dan berperilaku. Ini menghasilkan pengurangan oportunitas untuk pengembangan personal dan profesional.

4. Diskriminasi Hukum dan Institusional

Di beberapa tempat, undang-undang masih membedakan secara eksplisit antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Misalnya, undang-undang yang mengatur warisan, kepemilikan tanah, dan hak-hak lain seringkali merugikan perempuan, mengekang kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya keuangan dan ekonomi. Diskriminasi hukum ini juga dapat mencakup kurangnya perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan isu-isu hak reproduksi.

Untuk mengatasi diskriminasi ini, diperlukan tindakan dari berbagai sektor. Edukasi komprehensif tentang kesetaraan gender, reformasi kebijakan yang mengadvokasi kesamaan hak dan kesempatan, peningkatan representasi perempuan dalam semua aspek kehidupan publik, dan penyediaan sumber daya yang memperkuat kemandirian ekonomi

perempuan, semuanya adalah langkah penting yang perlu diambil untuk membongkar rintangan yang menghambat kemajuan perempuan.

Pembandingan detail antara hasil yang didapatkan dari penelitian ini dengan temuan dari studi-studi sebelumnya mengungkapkan adanya kesamaan dalam menyoroti barrier yang menghambat realisasi penuh kesetaraan gender di berbagai sektor masyarakat. Penelitian terdahulu oleh (Khairunnas et al., 2022) mengenai kesetaraan gender sering kali fokus pada identifikasi berbagai hambatan praktis yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai kesamaan di tempat kerja, dalam pendidikan, dan di kancah politik. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh (Iqbal & Harianto, 2022) menyelidiki bagaimana stereotip gender dan ekspektasi sosial secara negatif mempengaruhi kemampuan perempuan untuk maju dalam karir mereka. Studi ini secara eksplisit menunjukkan bahwa norma dan stereotip sosial berperan sebagai hambatan signifikan terhadap kemajuan profesional perempuan.

Namun, penelitian terkini ini berbeda karena ia menawarkan perspektif inovatif mengenai bagaimana subordinasi terwujud dalam bentuk struktural, dan berdampak luas pada status sosial perempuan. Berbeda dari pendekatan yang lebih tradisional, sebuah penelitian oleh (Luthfi, 2024) mulai mengkaji bagaimana struktur kekuasaan dalam organisasi dan institusi secara sistematis merugikan perempuan. Mereka menemukan bahwa subordinasi gender bukan hanya hasil dari interaksi sosial sehari-hari, tetapi juga tertanam dalam kebijakan, praktik, dan struktur resmi yang mendefinisikan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Studi ini memperluas pemahaman akan bagaimana barrier terhadap kesetaraan gender dioperasionalkan dalam skala yang lebih luas dan lebih fundamental.

Lebih lanjut, penelitian ini secara eksplisit menuntut rencana aksi yang holistik dan integratif untuk menangani masalah ini, menunjukkan bahwa solusi parsial atau ad-hoc tidak akan cukup untuk menyembuhkan penyakit sistemik subordinasi yang telah melembaga ini. Dalam konteks yang serupa, penelitian oleh Chang (2020) menekankan pada perlunya strategi lintas sektoral yang komprehensif untuk merespon isu kesetaraan gender. Dia berargumen bahwa pemecahan masalah yang efektif membutuhkan kolaborasi antar berbagai bidang kebijakan, dari pendidikan hingga reformasi hukum dan ekonomi, untuk secara efektif mengatasi akar penyebab dari ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan, namun secara eksplisit memperluas, pendekatan yang diajukan oleh Chang dengan menekankan pentingnya sebuah pendekatan kohesif yang merangkul semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan kembali kebutuhan mendesak untuk menanggapi dan mengatasi pola dan struktur yang menopang subordinasi terhadap perempuan. Hal ini menuntut langkah proaktif dan komprehensif yang melibatkan semua sektor masyarakat untuk memastikan bahwa kesenjangan gender dapat dijabatani, dan kesetaraan gender dapat dicapai secara lebih luas dan sistematis.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini merupakan bantahan yang kuat terhadap anggapan yang sempit bahwa subordinasi perempuan hanya muncul dari praktik yang eksplisit dan terisolasi. Sebaliknya, kajian ini menemukan bahwa subordinasi

terhadap perempuan bersumber dan terjalin dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Ini membuka pintu pemahaman bahwa tidak cukup hanya dengan perubahan pada tingkat individual atau dalam praktik sehari-hari saja, melainkan membutuhkan perombakan dan renovasi sistemik yang luas untuk menciptakan landasan yang benar-benar mendukung kesetaraan gender.

Hal ini mempertegas perlunya implementasi upaya yang transformatif di semua lapisan masyarakat untuk menjamin kemajuan signifikan dalam memerangi ketidaksetaraan gender. Pendekatan yang multidimensi, yang merangkul kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu, muncul sebagai strategi yang krusial untuk mengatasi akar masalah dan merancang masa depan yang lebih inklusif dan adil bagi semua gender. Hasil temuan ini, dengan demikian, menekankan urgensi untuk mendesain dan menerapkan strategi yang membenahi struktur sosial, ekonomi, dan politik guna mengusir praktik subordinasi dari akarnya, memastikan bahwa perempuan memperoleh kesetaraan sejati dalam segala aspek kehidupan.

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengungkap dan membuktikan bahwa subordinasi terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi struktural yang mendalam dan luas, yang secara signifikan menghambat kemajuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Temuan menunjukkan bahwa norma, nilai, dan institusi yang berkenaan dengan gender menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, membatasi akses mereka terhadap sumber daya, peluang, dan kekuasaan. Hal ini termanifestasi dalam kesenjangan upah, kurangnya representasi politik, stereotip sosial dan kultural yang merugikan, serta undang-undang dan kebijakan yang tidak memberikan perlindungan yang cukup.

Ringkasan temuan ini menegaskan hipotesis awal bahwa subordinasi bukan hanya sekedar diskriminasi sehari-hari, tetapi sebuah proses yang terstruktur dan sistemik yang merugikan perempuan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan yang komprehensif dan terkoordinasi yang mencakup reformasi kebijakan dan hukum, pendidikan masyarakat, serta promosi kesetaraan gender melalui praktik dan pemberian contoh di semua tingkat masyarakat dan pemerintahan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendekonstruksi pola-pola struktural yang mendukung subordinasi perempuan dan memastikan kemajuan yang merata dan adil bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin mereka.

Dalam menjalankan penelitian lebih lanjut, fokus akan diletakkan pada strategi-strategi konkrit untuk merombak norma sosial dan kultural yang menghambat kesetaraan gender, serta evaluasi terhadap keefektifan kebijakan dan program yang sudah ada dalam meningkatkan posisi sosioekonomi perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berakhir pada identifikasi masalah, tetapi juga mempertimbangkan arah solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai kemajuan nyata.

BIBLIOGRAFI

- Aula, M. R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 79–94.
- Dementieva, N. Z. (2024). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2023. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 221–227.
- Halim, J. R., Anjani, F., & Widjaja, D. C. (2019). 270 Hambatan-Hambatan Terhadap Perkembangan Karir Wanita Di Hotel Bintang 5 Di Surabaya. *Jurnal Hospitality Dan Manajemen Jasa*, 7(2).
- Iqbal, M. F., & Harianto, S. (2022). Prasangka, Ketidaksetaraan, dan Diskriminasi Gender dalam Kehidupan Mahasiswa Kota Surabaya: Tinjauan Pemikiran Konflik Karl Marx. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 187–199.
- Khairunnas, M., Daulay, H., & Saladin, T. I. (2022). Kepemimpinan Perempuan Aceh. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1559–1568.
- Luthfi, R. (2024). ANALISIS AL-QUR'AN SURAT AL-HUJURAT [49]: 13 SEBAGAI KRITIK TERHADAP DISKRIMINASI PENDIDIKAN PEREMPUAN. *INTEGRATIF/ Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 163–182.
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 1–24.
- Setyawan, B. (2020). Patriarki Sebagai Akar Diskriminasi Gender di Sri Lanka. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 1–14.